KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

11D60IXM

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 7 1 7			Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 1 5 4 9 9 2 7 6 2 7 2 2 0 0 0						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : HARYATI						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1 21-402-01	6.424.500	6.424.500	0	5	321.225	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 288 Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah : C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal : C.5 Nama Penandatangan :	Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR anisasi : 2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	HARI JUMADI Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						